



Analisis Komunikasi Politik Media Sosial Pemerintah Kabupaten Sikka Terhadap Kampanye Jaga Bersama Nian Tana

INFO PENULIS

Yanuarius Tibo
Universitas Nusa Nipa
oyentibo@gmail.com

Alfian Harbiyanto
Universitas Nusa Nipa

Wilfridus Valiance
Universitas Nusa Nipa

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 6, No. 1, April 2026
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Tibo, Y., Harbiyanto, A., & Valiance, W. (2026). Analisis Komunikasi Politik Media Sosial Pemerintah Kabupaten Sikka Terhadap Kampanye Jaga Bersama Nian Tana. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(1), 1443-1450.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas penggunaan media sosial dalam kampanye gerakan jaga bersama nian tana oleh pemerintah kabupaten Kabupaten Sikka dalam perspektif komunikasi politik. Dalam era komunikasi digital, media sosial menjadi instrumen strategis pemerintah daerah untuk menyebarkan pesan kebijakan, membangun citra, dan memperoleh legitimasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi digital (netnografi), dokumentasi, dan wawancara semi-terstruktur. Analisis dilakukan menggunakan model analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk yang mencakup analisis teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial resmi dinas lingkungan hidup kabupaten Sikka berfungsi efektif dalam meningkatkan kesadaran publik dan memperkenalkan nilai-nilai moral dalam menjaga lingkungan melalui narasi visual, slogan, dan dokumentasi kegiatan. Kampanye ini berhasil membangun legitimasi simbolik pemerintah sebagai aktor yang peduli terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan. Namun, efektivitas tersebut masih terbatas pada aspek informatif dan persuasif, karena komunikasi yang dibangun cenderung bersifat satu arah (top-down) dan belum sepenuhnya membuka ruang deliberasi publik yang partisipatif. Minimnya interaksi dua arah menunjukkan bahwa media sosial lebih difungsikan sebagai instrumen legitimasi kebijakan dibandingkan sebagai ruang dialog publik. Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas komunikasi politik digital tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyebarkan pesan, tetapi juga oleh kemampuan menciptakan ruang komunikasi yang dialogis dan partisipatif. Oleh karena itu, diperlukan transformasi strategi komunikasi politik yang lebih inklusif dan deliberatif agar kampanye kebijakan lingkungan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat secara berkelanjutan.

Kata kunci: komunikasi politik, media sosial, legitimasi, partisipasi publik, kebijakan lingkungan.

Abstract

This study analyzes the effectiveness of social media usage in the *jaga bersama nian tana* campaign conducted by the government of Sikka regency from a political communication perspective. In the era of digital communication, social media has become a strategic instrument for local governments to disseminate policy messages, construct public image, and gain legitimacy. This research employs a descriptive qualitative approach using digital observation (netnography), documentation, and semi-structured interviews. The analysis applies the critical discourse framework of Teun A. Van Dijk, encompassing textual analysis, social cognition, and social context. The findings reveal that the official social media accounts of the environmental agency of Sikka regency effectively increased public awareness and introduced moral values related to environmental protection through visual narratives, slogans, and activity documentation. The campaign successfully strengthened the symbolic legitimacy of the local government as an actor committed to environmental sustainability. However, its effectiveness remains largely limited to informative and persuasive functions, as communication tends to be one-way (top-down) and does not fully facilitate participatory public deliberation. The lack of two-way interaction indicates that social media functions more as a policy legitimation tool rather than as a deliberative public space. Conceptually, this study emphasizes that the effectiveness of digital political communication is determined not only by the ability to disseminate messages but also by the capacity to create dialogical and participatory communication spaces. Therefore, a more inclusive and deliberative communication strategy is required to ensure that environmental policy campaigns move beyond symbolic representation and foster sustained active public participation.

Keywords: political communication, social media, legitimacy, public participation, environmental policy.

A. Pendahuluan

Dalam lanskap demokrasi modern, komunikasi politik mengalami pergeseran paradigma yang fundamental. Komunikasi politik tidak lagi disempitkan hanya sebagai instrumen elektoral berkala seperti kampanye pemilu, melainkan telah bertransformasi menjadi proses berkelanjutan (*continuous process*) dalam seluruh siklus pemerintahan (McNair, 2018). Proses ini mencakup produksi, distribusi, dan pertukaran pesan yang secara strategis dirancang untuk membangun narasi kebijakan guna memperoleh legitimasi publik. Pemerintah tidak lagi sekadar menjalankan fungsi administrasi teknis yang kaku, melainkan bertindak sebagai aktor diskursif yang harus terus-menerus mengelola kepercayaan publik melalui pemaknaan isu-isu strategis (Norris, 2011; McNair, 2018).

Salah satu domain kebijakan yang menuntut komunikasi politik berkelanjutan dan diskursif adalah tata kelola lingkungan hidup. Isu lingkungan bukan sekadar persoalan teknis-ekologis seperti manajemen sampah atau konservasi wilayah, melainkan representasi dari isu politik yang sarat akan benturan kepentingan, tuntutan perubahan perilaku sosial, serta renegotiasi distribusi tanggung jawab antara negara dan warga (Dryzek, 2013). Keberhasilan kebijakan lingkungan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah daerah mampu mentransformasikan regulasi formal menjadi komitmen moral bersama yang dipahami secara kolektif oleh masyarakat.

Dalam konteks lokal di Indonesia, Pemerintah Kabupaten Sikka mencoba merespons tantangan ini melalui inisiasi program "Gerakan Jaga Bersama Nian Tana". Secara konseptual, gerakan ini dirancang bukan hanya sebagai program kebersihan taktis, melainkan sebagai simbolik kultural dan komitmen moral pemerintah daerah untuk menjaga ruang hidup bersama (*nian tana*). Guna mengomunikasikan kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Sikka melakukan adaptasi digital dengan memanfaatkan media sosial sebagai kanal komunikasi utama. Karakteristik media sosial yang kaya akan fitur visual dan naratif diadopsi untuk membangun bingkai (*framing*) isu lingkungan yang emosional dan artifisial, sekaligus mengonstruksi citra kepemimpinan yang responsif, adaptif, dan ekologis (Mergel, 2013).

Studi mengenai pemanfaatan media sosial oleh pemerintah daerah dalam komunikasi kebijakan sebenarnya telah banyak diperdebatkan oleh para peneliti terdahulu. Dimana kelompok peneliti pertama cenderung melihat media sosial secara optimis sebagai instrumen demokratisasi lokal yang mampu memotong birokrasi komunikasi tradisional, meningkatkan

transparansi, dan merangsang partisipasi publik (Bonsón et al., 2012; Bertot et al., 2012). kemudian peneliti yang lainnya mengambil posisi yang lebih skeptis-kritis, dengan argumen bahwa adopsi media sosial oleh instansi pemerintah sering kali terjebak dalam pola komunikasi satu arah (*one-way communication*). Media sosial dalam rona ini hanya dijadikan sebagai perpanjangan tangan papan pengumuman digital atau alat propaganda citra politik (e-gimmick) demi mengejar legitimasi kosmetik semata, tanpa menyediakan ruang deliberasi publik yang substansial (Chadwick, 2013; Mossberger et al., 2013).

Meskipun perdebatan antara optimisme partisipatif dan skeptisisme satu arah ini sudah banyak dikaji, masih terdapat celah kelangkaan studi (*research gap*) yang nyata. Mayoritas penelitian terdahulu lebih banyak mengambil lokus pada tata kelola pemerintahan di kota-kota besar (*urban-centric*) dengan penetrasi digital tinggi, atau berfokus pada isu-isu politik nasional yang berskala makro. Masih sangat sedikit perhatian akademis yang diarahkan pada bagaimana sebuah pemerintahan kabupaten di wilayah seperti Kabupaten Sikka mengartikulasikan isu lingkungan yang sensitif dan berbasis kearifan lokal (*nian tana*) melalui media sosial. Terdapat kontradiksi konseptual di mana isu lingkungan menuntut *output* berupa perubahan perilaku nyata dan partisipasi aktif, namun saluran komunikasi digital yang digunakan rentan terjebak dalam batas-batas pencitraan simbolik (*legitimasi*). Bagaimana kontradiksi ini berkelindan dalam kampanye digital pemerintah daerah di wilayah non metropolitan belum dijawab secara tuntas dalam literatur komunikasi politik kontemporer.

Di sinilah letak posisi dan kebaruan (*positioning*) dari penelitian ini. Penelitian ini tidak sekadar mereplikasi studi komunikasi digital pemerintahan yang sudah ada, melainkan bermaksud mengisi celah riset tersebut dengan mengevaluasi efektivitas kampanye "Gerakan Jaga Bersama Nian Tana" dari perspektif komunikasi politik McNair. Fokus analisis diarahkan pada tiga dimensi krusial: Legitimasi: Bagaimana pemerintah membangun otoritas narasi, Kesadaran (*Awareness*): Bagaimana publik memahami makna ekologis yang ditawarkan dan Partisipasi: Apakah media sosial berhasil menggerakkan aksi nyata atau mandek sebagai ruang satu arah yang simbolik. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi secara teoritis dalam memperkaya diskursus komunikasi politik digital pada level pemerintahan daerah non metropolitan, serta memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi model komunikasi kebijakan lingkungan yang lebih deliberatif dan integratif bagi pengambil kebijakan lokal.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain Netnografi yang dikombinasikan dengan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Teun A. van Dijk. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi, menginterpretasikan, dan menggambarkan secara mendalam fenomena komunikasi politik digital tanpa berfokus pada generalisasi statistik atau frekuensi angka (Moleong, 2013). Desain netnografi digunakan untuk melakukan observasi partisipatif dan imersif terhadap perilaku komunikasi, interaksi, serta ekspresi budaya publik di ruang siber (Kozinets, 2015). Sementara itu, model AWK Van Dijk diterapkan untuk membongkar bagaimana teks kebijakan lingkungan diproduksi, dikognisi secara sosial, dan berkelindan dengan struktur konteks sosial-politik di Kabupaten Sikka.

Lokus penelitian ini berada pada ruang digital, spesifik pada kanal media sosial resmi milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, yaitu Facebook: *Disling Kab Sikka* dan Instagram: *@disling_sikka*. Kemudian dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori diantaranya pertama unit tekstual dan visual: Unggahan (postingan), takarir (*caption*), infografis, video, serta komentar publik terkait kampanye "Gerakan Jaga Bersama Nian Tana" sepanjang periode kebijakan berlangsung. Dan Unit Subjek Informan: Pengguna aktif media sosial (*netizen*) yang menjadi pengikut (*followers*) aktif kedua akun tersebut dan masyarakat Kabupaten Sikka yang terpapar langsung oleh kampanye digital ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua jenis: data primer dimana data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui observasi digital (*netnografi*) berupa rekaman aktivitas komunikasi (unggah, simbol, narasi, teks komentar) pada akun Facebook dan Instagram Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, serta transkrip wawancara dengan informan. Kedua data sekunder: Data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi dokumentasi, pemberitaan media online lokal (seperti *FLORES TERKINI.com* dan *florespedia.id*), serta regulasi pemerintah, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan komunikasi politik dan kebijakan lingkungan.

Pengumpulan data dilakukan secara simultan melalui tiga teknik utama: 1. Observasi Digital (Netnografi): Peneliti melakukan pengamatan langsung secara terstruktur di ruang digital untuk merekam gaya bahasa, pola visualisasi, waktu unggah konten, serta dinamika interaksi (komentar, *likes*, *shares*) antara pemerintah daerah dan publik. 2. Dokumentasi Digital: Mengarsip dan mengkategorisasikan konten-konten digital substantif berbentuk foto, infografis, serta tangkapan layar (*screenshot*) komentar publik yang relevan dengan kampanye Jaga Bersama Nian Tana. 3. Wawancara Semi-Terstruktur: Dilakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) menggunakan panduan pertanyaan yang fleksibel kepada warga Sikka pengguna aktif media sosial. Tujuannya untuk menggali persepsi, tingkat kesadaran (*awareness*), serta bentuk partisipasi mereka setelah berinteraksi dengan kampanye tersebut.

Proses analisis data dalam penelitian ini mengoperasionalkan tahapan Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk yang bergerak secara interaktif melalui langkah-langkah berikut: pertama Analisis Teks (Struktur Teks/Struktur Makro-Mikro) Peneliti menelaah struktur pesan, gaya bahasa, pilihan kata (*diksi*), metafora, narasi, dan simbol visual yang diproduksi oleh akun media sosial Pemda. Pada tahap ini, konten diurai berdasarkan struktur makro (tematik), superstruktur (skematik alur pesan), dan struktur mikro (semantik, sintaksis, stilistika, dan retorik). Kedua Analisis Kognisi Sosial Peneliti melakukan analisis terhadap proses mental, motif politik, dan niat komunikasi di balik produksi wacana oleh komunikator politik (Dinas Lingkungan Hidup Sikka). Tahap ini dikonfirmasi melalui wawancara atau penelusuran dokumen kebijakan untuk memahami bagaimana Pemda Sikka mempersepsikan isu lingkungan sebelum menuangkannya ke media sosial. Ketiga Analisis Konteks Sosial (Kemasyarakatan) Peneliti menghubungkan teks kampanye digital tersebut dengan situasi sosial-politik yang nyata di Kabupaten Sikka. Pada tahap ini, data wawancara masyarakat diintegrasikan untuk melihat sejauh mana wacana digital tersebut memengaruhi kesadaran masyarakat, membentuk legitimasi pemerintah, atau justru mandek sebagai komunikasi satu arah. Keempat Penarikan Kesimpulan Merangkum seluruh jalinan antara teks, kognisi, dan konteks sosial untuk menjawab sejauh mana efektivitas komunikasi politik "Gerakan Jaga Bersama Nian Tana" di media sosial.

Untuk menjamin keabsahan dan keandalan data (*trustworthiness*) dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menerapkan teknik Triangulasi Sumber dan Triangulasi Metode (Denzin, 2009; Patton, 2014): Triangulasi Sumber: Peneliti memverifikasi kebenaran informasi dengan cara membandingkan data wacana media sosial Dinas Lingkungan Hidup Sikka dengan realitas data yang diperoleh dari perspektif publik (hasil wawancara masyarakat) serta laporan berita dari media online lokal (*FLORES TERKINI.com* dan *florespedia.id*). Triangulasi Metode: Peneliti menyilangkan data yang diperoleh melalui metode observasi digital (netnografi), metode dokumentasi arsip konten, dan metode wawancara semi-terstruktur untuk memastikan bahwa interpretasi wacana yang dihasilkan bersifat objektif, valid, dan kredibel secara akademis.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Komunikasi Politik dan Kampanye Kebijakan Publik

Komunikasi politik merupakan sebuah pertukaran pesan yang berkaitan dengan distribusi kekuasaan, pembuat kebijakan, dan pembentukan opini publik. Menurut Brian Mc Nair (2018) dalam komunikasi politik melibatkan tiga aktor utama yakni institusi politik, media, dan warga negara. Dalam konteks pemerintahan di daerah komunikasi politik hadir dalam bentuk kampanye kebijakan-kebijakan publik yang bertujuan untuk memperoleh dukungan serta membangun penerimaan masyarakat atas program yang di buat oleh pemerintah daerah. Sementra Dan Nimmo dalam *Political Communication and Public Opinion* (2011) menegaskan bahwa kampanye kebijakan public merupakan sebuah bentuk komunikasi politik non elektoral yang diarahkan untuk mempengaruhi persepsi dan opini publik terhadap sebuah kebijakan. Kampanye kebijakan tentu berbeda dengan kampanye elektoral karena orientasi keduanya berbeda dimana kampanye elektoral orientasinya pada perebutan suara sedangkan kampanye kebijakan atau program berorientasi pada pembentukan legitimasi kebijakan atau program dan penguatan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa media sosial resmi pemerintahan kabupaten Sikka melalui media sosial dinas lingkungan hidup kabupaten Sikka yang digunakan untuk kampanye program jaga bersama nian tana secara intensif dilakukan untuk mengempanyekan program ini sebagai bentuk gerakan moral dan budaya dalam menjaga lingkungan hidup. Narasi yang dibangun menekankan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan serta secara spesifik menampilkan pemerintahan kabupaten Sikka sebagai aktor utama yang berinisiatif dan

konsisten dalam menjalankan program jaga bersama nian tana tersebut. Farming ini memperkuat legitimasi simbolik pemerintah kabupaten Sikka sebagai pemimpin yang peduli terhadap isu lingkungan. Secara visual dan natarif konten media sosial pemerintahan kabupaten Sikka dalam kampanye program jaga bersama nian tana lebih banyak menampilkan aktivitas seremonial, dokumentasi kegiatan, serta pesan ajakan normatif. Hal ini tentu terdapat pada media sosial facebook: Disling Kab Sikka dan instagram: @disling_sikka yang di upload oleh pemerintahan kabupaten Sikka melalui dinas lingkungan hidup kabupaten Sikka. Ini menunjukkan bahwa fungsi media sosial lebih dominan sebagai alat untuk menyebarkan informasi kampanye program jaga bersama nian tana, kampanye program ini hanya sebagai penyebaran informasi saja karena tidak ada komentar pada platform media sosial pemerintahan yang di upload oleh dinas lingkungan hidup sehingga tidak terjadi ruang diskusi dua arah.

2. Media Sosial dalam Komunikasi Politik Pemerintah

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan persaingan antara media lama dan media baru saling berinteraksi dalam membentuk dinamika komunikasi politik. *The Hybrid Media System: Politics and Power* oleh Andrew Chadwick (2017) sebagai sistem media hibrida (*hybrid media system*) dimana terjadi persaingan yang luar biasa untuk keduanya. Dalam sistem ini media menjadi arena strategis bagi aktor politik untuk membangun farming isu, mengelola citra, serta mobilitas dukungan. Bagi pemerintahan daerah media sosial berfungsi tidak hanya sekedar sebagai alat penyebaran informasi saja melainkan juga sebagai instrumen pencitraan dan legitimasi kebijakannya. Pemerintahan daerah kabupaten Sikka melalui dinas lingkungan hidup mengemas pesan kebijakannya melalui foto kegiatan, video kampanye, dan slogan moral sehingga menciptakan kesan kedekatan simbolik antara pemimpin dan warganya. Namun efektivitas media sosial sangat bergantung pada sejauh mana komunikasi tersebut bersifat dialogis dan partisipatif dari masyarakat sebagai penerima pesan kampanye yang disampaikan oleh pemerintah. Jika media sosial hanya digunakan sebagai papan penunjam digital semata maka fungsi deliberatifnya semakin terbatas.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa media sosial pemerintahan daerah kabupaten Sikka melalui dinas lingkungan hidup cenderung berfungsi sebagai alat legitimasi kebijakan dibandingkan sebagai ruang deliberasi publik (*deliberative space*). Karakter komunikasi yang *topdown* memperlihatkan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya diiringi dengan transformasi paradigma komunikasi politik yang bersifat partisipatif. Yang semestinya partisipasi dari masyarakat harus banyak dalam interaksi digital sehingga menjadi bentuk untuk komunikasi politik partisipatif terlaksana dengan baik dalam kampanye program jaga bersama nian tana yang dicetuskan oleh pemerintahan kabupaten Sikka yang di posting oleh dinas lingkungan hidup dalam platform media sosialnya.

3. Efektivitas Komunikasi Politik

Efektivitas komunikasi politik dapat diukur dari berbagai indikator seperti tingkat pemahaman pesan, penerimaan publik, perubahan sikap, serta keterlibatan masyarakat dalam tindakan nyata dalam mengaktualisasikan program jaga bersama nian tana dalam kehidupannya. Tindakan nyata dari program jaga bersama nian tana dengan melaksanakan tindakan nyata seperti menjaga lingkungan tersebut. Dalam perspektif Jay G. Blumler dan Dennis Kavanagh (1999) dengan artikel berjudul *The Third Age of Political Communication* mengatakan bahwa era komunikasi politik kontemporer ditandai dengan meningkatnya peran media dalam membentuk persepsi publik. Oleh karena itu dalam kampanye program jaga bersama nian tana oleh pemerintahan kabupaten Sikka mesti menempatkan legitimasi program kebijakan sangat dipengaruhi oleh strategi komunikasi yang digunakannya.

Dalam temuan penelitian efektivitas dari kampanye program jaga bersama nian tana tidak hanya berhenti pada kemampuan komunikasi politik saja tetapi dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan program jaga nian tana tersebut. Dalam kebijakan lingkungan yang di buat oleh pemerintahan kabupaten Sikka melalui program jaga bersama nian tana tentu partisipasi dapat berupa keterlibatan masyarakat dalam aksi kolektif, perubahan perilaku, maupun kontribusi dalam diskusi kebijakan.

Dari sisi kesadaran publik kampanye melalui media sosial pemerintahan kabupaten Sikka melalui dinas lingkungan hidup cukup efektif dalam memperkenalkan program dan menanamkan pesan moral pada kampanye gerakan jaga bersama nian tana. Masyarakat mengenal dan memkani slogan program jaga bersama nian tana. Masyarakat mengenal selogan dan tujuan dari program jaga nian tana serta menunjukkan penerimaan secara simbolik terhadap gagasan menjaga lingkungan tersebut, dilihat dengan adanya kesadaran masyarakat seperti di kantor-

kantor, instansi pemerintahan, sekolah dan perguruan tinggi melakukan gerakan jaga bersama nian tana ini dalam lingkup wilayahnya masing-masing. Namun dalam dalam mendorong partisipasi aktif dalam media sosial seperti komentar kritisi, diskusi kebijakan, atau isiatif warga di desa-desa atau kampung-kampung masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi polirik dalam program kampanye jaga bersama nian tana ini masih bersifat *top down* dengan dominasi pesan masih oleh pemerintahan kabupaten Sikka melalui dinas lingkungan hidup saja. Harapan tentu kampanye program jaga bersama nian tana ini menjadi kepemilikan bersama yang dimana didiskusikan dalam platfrom digital sebagai wujud dari interaksi yang bersifat *bottom up* dan keterlibatan sampai pada desa atau kelurahan dan kampung-kampung secara keseluruhan pada wilayah kabupaten Sikka.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial oleh pemerintah kabupaten Sikka melalui akun resmi dinas lingkungan hidup dalam kampanye program gerakan jaga bersama nian tana telah menjadi bagian penting dari praktik komunikasi politik kontemporer di tingkat pemerintahan daerah. Media sosial berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menyebarkan pesan kebijakan, membangun narasi lingkungan, serta memperkuat legitimasi simbolik pemerintah sebagai aktor yang memiliki komitmen terhadap isu keberlanjutan lingkungan. Melalui narasi visual, slogan moral, dan dokumentasi kegiatan, pemerintah berhasil membingkai program ini sebagai gerakan kolektif yang memiliki dimensi moral, sosial, dan kultural, sehingga mampu meningkatkan kesadaran publik dan memperkenalkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan hidup.

Dari perspektif efektivitas komunikasi politik, temuan penelitian menunjukkan bahwa media sosial cukup efektif dalam membangun kesadaran dan penerimaan simbolik masyarakat terhadap program gerakan jaga bersama nian tana. Hal ini terlihat dari meningkatnya pengenalan publik terhadap slogan dan tujuan program, serta munculnya praktik-praktik simbolik menjaga lingkungan di berbagai institusi seperti kantor pemerintahan, sekolah, dan ruang publik lainnya. Dengan demikian, media sosial telah berhasil menjalankan fungsi informatif dan persuasif dalam membentuk opini publik dan memperkuat legitimasi kebijakan lingkungan pemerintah daerah.

Namun demikian, efektivitas penggunaan media sosial dalam kampanye ini masih memiliki keterbatasan pada aspek partisipasi dan deliberasi publik. Karakter komunikasi yang cenderung bersifat top-down menunjukkan bahwa media sosial lebih difungsikan sebagai alat penyebaran informasi dan legitimasi kebijakan, dibandingkan sebagai ruang dialog publik yang partisipatif. Minimnya interaksi dua arah, seperti diskusi kritis, umpan balik masyarakat, maupun keterlibatan warga dalam perumusan dan evaluasi kebijakan, menunjukkan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya diiringi dengan transformasi paradigma komunikasi politik yang deliberatif dan partisipatif.

Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas komunikasi politik dalam era digital tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam menyebarkan pesan, tetapi juga oleh kemampuannya dalam menciptakan ruang komunikasi yang dialogis, inklusif, dan partisipatif. Media sosial memiliki potensi besar tidak hanya sebagai instrumen legitimasi simbolik, tetapi juga sebagai ruang deliberasi publik yang dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembangunan kebijakan yang demokratis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial dalam kampanye gerakan jaga bersama nian tana oleh pemerintah kabupaten Sikka telah efektif dalam meningkatkan kesadaran publik dan membangun legitimasi kebijakan lingkungan, namun belum sepenuhnya efektif dalam mendorong partisipasi aktif dan komunikasi politik yang dialogis. Oleh karena itu, diperlukan transformasi strategi komunikasi politik yang lebih partisipatif dengan mendorong interaksi dua arah, keterlibatan masyarakat secara substantif, serta penguatan fungsi media sosial sebagai ruang deliberasi publik. Upaya ini penting agar kampanye kebijakan lingkungan tidak hanya berhenti pada tingkat simbolik dan informatif, tetapi mampu menghasilkan keterlibatan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan dalam menjaga lingkungan sebagai tanggung jawab bersama.

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sikka, khususnya dinas lingkungan hidup, dalam mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai instrumen komunikasi politik yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam kampanye gerakan jaga bersama nian tana.

Pertama pemerintah daerah perlu menggeser paradigma penggunaan media sosial dari sekadar instrumen penyebaran informasi (one-way communication) menjadi ruang komunikasi yang dialogis dan partisipatif (two-way communication). Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong interaksi aktif melalui kolom komentar, forum diskusi digital, sesi tanya jawab (Q&A), serta membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan usulan terkait kebijakan lingkungan. Dengan demikian, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat legitimasi kebijakan, tetapi juga sebagai ruang deliberasi publik yang demokratis.

Kedua pemerintah perlu mengembangkan strategi komunikasi politik digital yang lebih inklusif dan berbasis partisipasi masyarakat. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah melibatkan masyarakat sebagai co-creator dalam kampanye digital, misalnya melalui publikasi konten yang berasal dari inisiatif warga, komunitas lingkungan, sekolah, dan desa. Pendekatan ini dapat memperkuat rasa kepemilikan publik (sense of ownership) terhadap program jaga bersama nian tana sehingga kampanye tidak hanya dipersepsikan sebagai program pemerintah, tetapi sebagai gerakan kolektif masyarakat.

Ketiga pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas dan variasi konten komunikasi digital dengan tidak hanya menampilkan aktivitas seremonial dan simbolik, tetapi juga konten edukatif, informatif, dan reflektif yang menjelaskan dampak nyata kebijakan lingkungan, tantangan yang dihadapi, serta peran konkret masyarakat dalam menjaga lingkungan. Konten berbasis edukasi publik, testimoni masyarakat, dan praktik baik (best practices) dari komunitas lokal dapat memperkuat efektivitas komunikasi politik dalam mendorong perubahan perilaku sosial.

Keempat pemerintah perlu memperkuat integrasi komunikasi digital dengan implementasi kebijakan di tingkat akar rumput, seperti desa, kelurahan, dan komunitas lokal. Media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk memfasilitasi koordinasi, pelaporan kegiatan masyarakat, serta dokumentasi partisipasi publik secara transparan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa komunikasi politik tidak hanya berhenti pada tingkat simbolik, tetapi mampu mendorong tindakan nyata dan partisipasi kolektif masyarakat secara berkelanjutan.

Kelima secara akademik penelitian ini merekomendasikan agar penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas komunikasi politik digital pemerintah daerah dengan menggunakan pendekatan yang lebih beragam, seperti pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat keterlibatan publik (engagement), atau pendekatan campuran (mixed methods) untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi peran aktor non pemerintah, seperti komunitas sipil dan media lokal, dalam memperkuat komunikasi kebijakan lingkungan.

Secara keseluruhan optimalisasi penggunaan media sosial sebagai instrumen komunikasi politik yang dialogis, partisipatif, dan transparan merupakan langkah strategis yang penting untuk memperkuat legitimasi kebijakan, meningkatkan kesadaran publik, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung keberhasilan program gerakan jaga bersama nian tana sebagai gerakan kolektif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Kabupaten Sikka.

E. Referensi

- Akun Facebook Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka: Disling Kab Sikka
 Akun Instagram Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka: disling_sikka
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2012). Promoting transparency and accountability through ICTs, social media, and collaborative e-government. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 6(1), 78–91.
- Blumler, J. G., & Kavanagh, D. (1999). *The third age of political communication*. *Political Communication*, 16(3), 209-230.
- Bonsón, E., Torres, L., Royo, S., & Flores, F. (2012). Local e-government 2.0: Social media of public administration in agricultural countries. *Government Information Quarterly*, 29(2), 123–132.
- Chadwick, A. (2013). *The hybrid media system: Politics and power*. Oxford University Press.
- Chadwick, A. (2017). *The Hybrid Media System: Politics and Power*. Oxford: Oxford University Perss.
- Denzin, N. K. (2009). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. Transaction Publishers.
- Dryzek, J. S. (2013). *The politics of the earth: Environmental discourses* (3rd ed.). Oxford University Press.

- Eriyanto. (2006). *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*, Lkis,:Yogyakarta
- Flores Terkini.com (2025, 24 April). Bupati Sikka Ajak ASN dan Masyarakat Wujudkan Budaya Bersih Lewat Gerakan Brantas Sampah. Diakses dari: <https://floresterkini.pikiran-rakyat.com>
- Florespedia.id (2025, 28 April). Bupati Sikka Dorong ASN dan Warga Bangun Budaya Hidup Bersih melalui Gerakan Jaga Nian Tanah. Diakses dari: <https://florespedia.id>
- Jorgensen, Marianne, Phillips Louise J, terjemahan Imam Suyitno,dkk, (2007). *Analisis Wacana Teori dan Metode*, Pustaka Pelajar,Yogyakarta.
- Klowe, M (2026, 20 Januari). Wawancara Pribadi
- Kozinets, R. V. (2015). *Netnography: Redefined* (2nd ed.). SAGE Publications.
- McNair, B. (2018). *An introduction to political communication* (6th ed.). Routledge.
- McNair, B. (2018). *An Introduction to Political Communication*. London: Routledge.
- Menis, Y (2026, 21 Januari). Wawancara Pribadi
- Mergel, I. (2013). A framework for interpreting social media use in government. *Government Information Quarterly*, 30(4), 327-334.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. Thousand Oaks: Sage.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mossberger, K., Wu, Y., & Crawford, J. (2013). Connecting citizens and local governments? Social media and interactivity in major US cities. *Government Information Quarterly*, 30(4), 351-358.
- Nimmo, D. (2011). *Political Communication and Public Opinion*. New York: Routledge.
- Norris, P. (2011). *Democratic deficit: Critical citizens revisited*. Cambridge University Press
- Paredes, M, A (2026, 21 Januari). Wawancara Pribadi
- Patton, M. Q. (2014). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE Publications.
- Sobur, Alex. (2006). *Analisis Teks Media*, P.T. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Tibo, Y., Liwu. E. I. K., & Valiance, W. (2025). *Konstruksi Citra Bupati Kabupaten Sikka Periode 2025-2030 melalui Komunikasi Politik di Media Sosial: Facebook, instagram, dan TikTok*. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 5639-5644.
- Van Dijk, T. A. (2015). Critical discourse analysis. In D. Tannen, H. E. Hamilton, & D. Schiffrin (Eds.), *The handbook of discourse analysis* (2nd ed., pp. 466-485). John Wiley & Sons, Ltd.